BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan juga negara demokrasi. Kedua hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berkaitan dengan hal itu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa hak negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.¹

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45**, tersedia di <http://mkri.id>, diakses tanggal 10 Mei 2023

dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik.²

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Kebebasan Berpendapat/Beropini dan Kebebasan Berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental dan penting dalam negara yang demokratis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diperlukan untuk mewadahi ide, gagasan, pemikiran, sikap dan sebagainya serta penting untuk memastikan berjalannya proses-proses demokrasi. Hak-Hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, termasuk diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering di bicarakan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah hal tersebut membawa angin segar bagi

² Darwin Prinst, 2001, **Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia**. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 72

³ Ashri, M. 2018, **Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar**. CV. Social Politic Genius, Makassar hlm. 21

masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis yaitu harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.⁴

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yaitu : " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang⁵ dan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 13 yang memuat bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia" dan Pasal 14 ayat 1 memuat "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk

⁴ Krisna Harahap, 2003, **HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia**. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 72

⁵ Nasution, B. J, 2011, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 56

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Perlindungan dimaksud dimuat juga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menyatakan:” Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Dalam Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet.⁶ Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga

⁶Budhi, Utama Arif. 2015. **Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya**, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 56

menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjatuh salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan email berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra". Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandanginya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik. Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet.⁷ Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur.

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas penulis menganalisis Konflik Norma antara Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan Berpendapat melalui media internet dimana dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan dan atau Tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan Undang -Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik bertujuan untuk mengatur pertukaran informasi dan transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, UU

⁷ Sunarso, Siswanto, 2009 **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Study Kasus Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 68

ITE justru memicu adanya pembatasan dalam berpendapat. hal ini disebabkan dengan adanya pasal yang disebut dengan pasal karet didalamnya. UU ITE yang pada dasarnya diharapkan mampu untuk mengatur kebebasan berpendapat dalam media sosial ternyata mengalami ketidaksesuaian dalam penerapannya. Adanya UU ITE justru dianggap membatasi atau bahkan membungkam kebebasan berpendapat itu sendiri. Terdapat pasal yang menuai kontra dan memiliki ketidakjelasan dalam implementasinya sehingga menjadi kelemahan didalamnya. Inilah yang dianggap pasal karet dalam UU ITE.⁸

Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di media Internet ditinjau dari perspektif HAM?

⁸ Ismail Cawidu, 2013, **Bijak Bermedia Sosial**, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Jakarta, hlm, 29

2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu regulasi perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM dan permasalahan kedua yaitu kebebasan berpendapat dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) Di fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hak Asasi Manusia.
2. Untuk penyusunan skripsi guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala.

Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.⁹

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yakni berkaitan dengan hak perlindungan kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah doktrin hukum progresif, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memiliki atau memuat rasa keadilan yang diharapkan. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan kebebasan berpendapat dalam undang-undang ITE Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini pembahasannya lebih diarahkan terkait dengan kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia yaitu dalam pasal-pasal 22 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

⁹ Zainudin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta hlm, 15

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 37

1.5.2 Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (statute approach), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang dipandang telah membungkam hak kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang. serta konflik Norma antara UU No. 19 Tahun 2016 dengan UU No.39 Tahun 1999 mengenai kebebasan Berpendapat melalui media internet dimana dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan dan atau Tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan Undang -Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik bertujuan untuk mengatur pertukaran informasi dan transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, UU ITE justru memicu adanya pembatasan dalam berpendapat. hal ini disebabkan dengan adanya pasal yang disebut dengan pasal karet didalamnya. UU ITE yang pada dasarnya diharapkan mampu untuk mengatur kebebasan berpendapat dalam media sosial ternyata mengalami ketidaksesuaian dalam penerapannya. Adanya UU ITE justru dianggap membatasi atau bahkan membungkam kebebasan berpendapat itu sendiri. Terdapat pasal yang menuai kontra dan memiliki ketidakjelasan dalam implementasinya

sehingga menjadi kelemahan didalamnya. Inilah yang dianggap pasal karet dalam UU ITE.

1.5.3 Sumber data

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹¹ Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber-sumber penelitian yang digunakan antarlain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

¹¹ Syahrudin Dan Salim, 2011. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Citapustaka Media, Bandung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dimulai dengan

penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat dalam UU ITE tersebut.
- c) Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini.

1.5.5 Teknik analisis data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi atau penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkap di dalam undang-undang. Ia menyatakan "Dieses geschicht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers

versetzt und diese Tätigkeit in sich künftlich wiederholt, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehen laszt ". (Ini dilakukan dengan menempatkan pemikiran seseorang pada sudut pandang pembuat undang-undang dan mengulangi kegiatan ini secara artifisial dalam diri sendiri, yaitu membiarkan hukum muncul kembali dalam pemikiran mereka)".

Sedangkan Sudikno mengatakan bahwa Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹² Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain : interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teologi atau sosiologi, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis.

Di dalam beberapa literatur dikenal juga interpretasi autentik. Bahkan interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik dapat dimasukkan ke dalam interpretasi sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan satu interpretasi, beberapa interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya interpretasi autentik, yakni penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang. Selain itu peneliti juga menggunakan jenis interpretasi sistematis yang menurut P.W.C. Akkerman

¹² Hidayat, Aziz Alimut, 2007. **Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data**, Salemba Medika, Jakarta, hlm 34

adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Dalam interpretasi sistematis ini hubungan tidak hanya dilihat secara teknis, melainkan juga dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori peran, Teori sistem hukum dan kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian peran, pengertian kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB III Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai hak dan batasan-batasan mengeluarkan pendapat di media Internet?

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama di bahas mengenai Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE mengenai hak dan batasan-batasan mengeluarkan pendapat di media internet

BAB IV Bagaimana bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media internet berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang dapat

diberikan sehubungan dengan simpulan yang di peroleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.